

**PENGARUH KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP  
KEMISKINAN DI PROVINSI LAMPUNG DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PERIODE 2015-2019**



**Skripsi**

**REYNALDY NOVRIANSYAH  
NPM. 1551010273**

**Program Study Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/ 2021 M**

**PENGARUH KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP  
KEMISKINAN DI PROVINSI LAMPUNG DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PERIODE 2015-2019**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Oleh:**

**Reynaldy Novriansyah  
1551010273**



**Jurusan : Ekonomi Syari'ah**

**Pembimbing Akademik I : Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt., C.A  
Pembimbing Akademik II : Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2021 M**

## ABSTRAK

### **PENGARUH KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PERIODE 2015-2019**

Oleh

**Reynaldy Novriansyah**

Pada tahun 2019 tepat nya di salah satu kabupaten Provinsi Lampung, pada penyaluran Dana Desa tahap I, menurut kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Wirham Riadi menjelaskan, dari 264 desa yang tersebar di 24 kecamatan di Lampung Timur, terdapat 2 desa yang belum menyampaikan usulan pencairan Dana Desa, dan salah satu desa dari kedua desa tersebut masih terdapat permasalahan Dana Desa tahun 2018 silam yang belum terselesaikan. Alasan penelitian ini diperkuat dengan permasalahan **Korupsi** yang terjadi di dilakukan oleh Mantan Kepala Desa Labuhan Jaya Gunung Labuhan Way Kanan dengan data Dana Desa tahun 2018-2019 dengan mengutip situs resmi **Putusan Mahkamah Agung** dan didakwa menggunakan anggaran dana desa untuk kepentingan pribadi. Diungkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Waykanan Marimbun Pangabea dalam dakwaannya. “Yang dimana sebagian dana desa sebesar Rp991.877.860 separuhnya sebesar Rp675.582.560,00 terdakwa pakai sendiri untuk kepentingan pribadinya

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaruh, pengalokasian, serta efektifitas kebijakan Dana Desa terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung periode 2015-2019 menggunakan indikator SDG's ? (2) Bagaimana pandangan dalam Perspektif Ekonomi Islam mengenai pengalokasian serta kebijakan Dana Desa terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung ?

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka pada penelitian terdahulu dan sumber terpercaya seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral

Perimbangan Keuangan (DPJK). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi linier sederhana.

Secara keseluruhan hasil analisis regresi linier sederhana disimpulkan bahwa, jika signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, dan jika signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima. Karena signifikansi pada tabel *Coefficients* lebih kecil dari 0,05 yaitu  $0,008 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya Dana Desa dinyatakan berpengaruh terhadap penduduk miskin dan tingkat dari pengaruh nya berdasarkan hasil Analisis Regresi Linier Sederhana adalah Positif. Artinya Kenaikan Dana Desa akan diikuti pula oleh kenaikan tingkat penduduk miskin. Hal ini dikarenakan beberapa sektor desa di Provinsi Lampung belum bisa mengoptimalkan penggunaan Dana Desa di tiap daerah yang disebabkan masalah-masalah seperti, keterlambatan penyaluran Dana Desa, serta korupsi yang membuat kerugian besar bagi masyarakat, juga permasalahan lain yang membuat Dana Desa di Provinsi Lampung menjadi kurang efektif, dan masih ada desa yang belum terdapat Badan Usaha Milik Desa sebagai bentuk dari pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Lampung. **Q.S Al Isra Ayat 26** yang menegaskan bahwa setiap warga miskin harus diberi bantuan sama rata dan tidak boleh boros dalam penggunaan harta.

## **ABSTRACT**

### **PENGARUH KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PERIODE 2015-2019**

By

**Reynaldy Novriansyah**

In 2019, to be precise in one of the districts of Lampung Province, in the first phase of the distribution of Village Funds, according to the head of the Village Government and Community Empowerment Agency (BPMPD) Wirham Riadi explained, out of 264 villages spread across 24 sub-districts in East Lampung, 2 villages have not submitted a proposal for the disbursement of the Village Fund, and one of the villages from the two villages still has problems with the 2018 Village Fund that have not been resolved. The reason for this research is reinforced by the problem of corruption that occurred in the former Labuhan Jaya Village Head Gunung Labuhan Way Kanan with Village Fund data for 2018-2019 by citing the official website of the Supreme Court's Decision and was charged with using the village fund budget for personal interests. This was revealed by the Public Prosecutor (JPU) of the Kejari Waykanan Marimbun Pangabean in his indictment. "Which is part of the village fund of Rp.991,877,860, half of which is Rp.675,582,560.00, the defendant uses himself for his interests.

The formulation of the problem in this study is (1) How are the influence, allocation, and effectiveness of the Village Fund policy on Poverty in Lampung Province for the 2015-2019 period using the SDG's indicators? (2) What is the view in the Islamic Economic Perspective regarding the allocation and policy of the Village Fund towards Poverty in Lampung Province?

This research is quantitative research with secondary data. Data collection in this study uses documentation and literature studies on previous research and reliable sources such as the Central Statistics Agency (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DPJK).

The collected data were analyzed using simple linear regression analysis.

Overall, the results of simple linear regression analysis concluded that, if the significance was  $< 0.05$  then  $H_0$  was rejected, and if the significance was  $> 0.05$  then  $H_0$  was accepted. Because the significance in the Coefficients table is less than 0.05, i.e.  $0.008 < 0.05$ ,  $H_0$  is rejected and  $H_a$  is accepted. This means that the Village Fund is declared to have an effect on the poor and the level of its influence based on the results of the Simple Linear Regression Analysis is Positive. This means that the increase in the Village Fund will also be followed by an increase in the level of the poor. This is because several village sectors in Lampung Province have not been able to optimize the use of Village Funds in each region due to problems such as delays in the distribution of Village Funds, as well as the corruption that causes huge losses to the community, as well as other problems that make Village Funds in Lampung Province, become less effective, and there are still villages that do not yet have Village-Owned Enterprises as a form of empowering rural communities in Lampung Province. Q.S Al Isra Verse 26 emphasizes that every poor person must be given equal assistance and must not be wasteful in the use of the property.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suramin, Sukarama, Bandar Lampung (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi **Pengaruh Kebijakan Dana Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Nama Mahasiswa **Reynaldy Novriansyah**

NPM **1551010273**

Program Studi **Ekonomi Syariah**

Fakultas **Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt., C.A. Okta Supriyaningsih, S.E., M.E. Sy.**  
**NIP. 19700926200811008 NIP.**

**Ketua Jurusan**

**Madnasir, S.E., M.S.**

**NIP. 197504242002121001**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol. H. EndroSuramin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2015-2019"** disusun oleh **Reynaldy Novriansyah**, NPM 1551010273 Program Studi **Ekonomi Syariah** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal: Kamis 28 Oktober 2021.

**TIM PENGUJI**

Ketua : **Dr. Hi. Syamsul Hilal, M.Ag**

Sekretaris : **Taufiqurrahman, S.E., M.S.I**

Penguji I : **Any Eliza, S.E., M.A**

Penguji II : **Prof.Dr.Tulus Suryanto, M.M., Akt., C.A**

Penguji-III : **Oktia Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Prof. Dr. Guntan Abdul Ghofur, M.S.I.**  
NIP. 196308012003121001



## MOTTO

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

“Dan memberikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga bagi orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.<sup>1</sup>

(Q.S Al-Isra 26)



---

<sup>1</sup> Kitab *Al-Qur'an*, Al Isra 26

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Syamsudin S.Ag dan Ibu Wivina Cindy. Yang saya sayangi dan saya cintai yang telah merawat saya, menguatkan saya, dan memberikan dukungan moral maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Saudara-saudara kandung saya, Yoga Hardiansyah dan Sandy Ramadhan berkat do'a dan dukungan semangat mereka saya mampu menyelesaikan skripsi ini.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dianugrahi nama Reynaldy Novriansyah, dilahirkan di Kota Bandar Lampung, pada tanggal 09 November 1997. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan bapak Syamsudin S.Ag dan ibu Wivina Cindy adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu :

1. Pendidikan pertama di SDN 02 Sawah Bresbes dan diselesaikan pada tahun 2009.
2. Pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 24 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2012.
3. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2015.
4. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2015-2019” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut- pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh penyelesaian skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan Mahasiswa/i.
2. Madnasir, S.E., M.Si., dan Budimansyah, S.T.H.I, M.Kom.I, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt., C.A., selaku pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktunya untuk mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
4. Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy., selaku pembimbing II yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi kepada penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu serta motivasi yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan pada Fakultas Ekonomi



dan Bisnis Islam, Institut, serta perpustakaan daerah yang telah memberikan informasi data, refrensi, dan lain-lain.

7. Sahabat-Sahabat serta kerabat dekat, Risti Kurnia Dewi, Ricko Noviyadi, Abdul Malik, Ka rofi, keluarga besar Maverick serta sahabat seperjuangan kelas E, Jurusan Ekonomi Syari'ah, angkatan 2015 yang selalu bersama selama proses perkuliahan serta memberikan dukungan, semangat, dan bantuan dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini.
8. Serta seluruh Pihak yang telah memberikan dukungan, do'a, dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan yang peneliti miliki. Untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitina ini. Peneliti berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan ilmu-ilmu ke Islaman di zaman modern.

Bandar Lampung, Januari 29 2020,  
Penulis,

**Reynaldy Novriansyah**  
NPM. 1551010273

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                         | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                               | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN.....</b>                           | <b>vi</b>   |
| <b>PENGESAHAN.....</b>                            | <b>vii</b>  |
| <b>MOTTO.....</b>                                 | <b>viii</b> |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                           | <b>ix</b>   |
| <b>RIWAYAT HIDUP.....</b>                         | <b>x</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                        | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                            | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                          | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                         | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>                        |             |
| A. Penegasan Judul .....                          | 1           |
| B. Latar Belakang .....                           | 2           |
| C. Pembatasan Masalah .....                       | 21          |
| D. Rumusan Masalah .....                          | 21          |
| E. Tujuan dan Manfaat.....                        | 22          |
| F. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan ..... | 22          |
| G. Sistematika Penulisan.....                     | 24          |
| <b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>                    |             |
| A. Landasan Teori.....                            | 27          |
| 1. Teori Kesejahteraan Pareto .....               | 27          |
| 2. Teori Kebijakan Van Meter dan Van Horn.....    | 27          |
| 3. Teori Kemiskinan Sharp Et Al.....              | 30          |
| B. Dana Desa .....                                | 31          |
| 1. Definisi Dana Desa .....                       | 31          |
| 2. Sumber Dana Desa.....                          | 33          |
| 3. Tujuan Dana Desa.....                          | 34          |
| 4. Mekanisme Penyaluran Dana Desa.....            | 36          |
| 5. Dana Desa Dalam Perspektif Islam.....          | 39          |
| C. Kemiskinan.....                                | 40          |
| 1. Definisi Kemiskinan.....                       | 40          |
| 2. Penyebab Kemiskinan .....                      | 42          |

|  |    |
|--|----|
| 3. Indikator Kemiskinan SDGs .....                 | 43 |
| 4. Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam ..... | 47 |
| 5. Hubungan Dana Desa dengan Kemiskinan .....      | 49 |
| D. Ekonomi Islam .....                             | 50 |
| 1. Definisi Ekonomi Islam .....                    | 50 |
| 2. Karakteristik Ekonomi Islam .....               | 51 |
| 3. Tujuan Ekonomi Islam .....                      | 52 |
| E. Hipotesis .....                                 | 52 |
| F. Kerangka Berpikir .....                         | 53 |

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Jenis dan Sifat Penelitian .....        | 55 |
| 1. Jenis Penelitian .....                  | 55 |
| 2. Sifat Penelitian .....                  | 55 |
| B. Sumber Data .....                       | 56 |
| 1. Data Sekunder .....                     | 56 |
| C. Teknik Pengumpulan Data .....           | 56 |
| 1. Dokumentasi dan Studi Pustaka .....     | 56 |
| D. Definisi Operasional Variabel .....     | 58 |
| 1. Definisi Operasional Variabel .....     | 58 |
| E. Populasi dan Sampel .....               | 60 |
| 1. Populasi .....                          | 60 |
| 2. Sampel .....                            | 60 |
| F. Metode Analisis Data .....              | 61 |
| 1. Uji Asumsi Klasik .....                 | 61 |
| a. Uji Normalitas .....                    | 61 |
| b. Uji Multikolinieritas .....             | 62 |
| c. Uji Autokorelasi .....                  | 62 |
| d. Uji Heteroskedastisitas .....           | 63 |
| 2. Alat Uji Hipotesis .....                | 63 |
| a. Uji R-Square .....                      | 63 |
| b. Analisis Regresi Linier Sederhana ..... | 64 |

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....     | 67 |
| 1. Kondisi Geografis Provinsi Lampung ..... | 67 |

|   |     |
|---|-----|
| B. Kondisi Demografis Provinsi Lampung .....    | 68  |
| 1. Jumlah Penduduk .....                        | 68  |
| 2. Lembaga Pendidikan .....                     | 69  |
| C. Proses Kebijakan Pelaksanaan Dana Desa ..... | 70  |
| D. Analisis Sample Dana Desa .....              | 74  |
| 1. Analisis Sampel Dengan Indikator SDGs .....  | 74  |
| E. Instrumen Penelitian.....                    | 87  |
| 1. Uji Asumsi Klasik.....                       | 87  |
| a. Uji Normalitas.....                          | 87  |
| b. Uji Multikolinieritas.....                   | 90  |
| c. Uji Heteroskedastisitas.....                 | 92  |
| d. Uji Autokorelasi.....                        | 93  |
| F. Analisis Regresi.....                        | 95  |
| 1. Analisis Regresi Linier Sederhana .....      | 95  |
| 2. Output R dan R-Square .....                  | 95  |
| G. Pengujian Hipotesis .....                    | 96  |
| 1. Persamaan regresi linier sederhana .....     | 96  |
| 2. Menentukan Nilai Signifikansi.....           | 98  |
| 3. Merumuskan Hipotesis.....                    | 98  |
| H. Pembahasan .....                             | 99  |
| <b>BAB V : PENUTUP</b>                          |     |
| A. Kesimpulan.....                              | 107 |
| B. Saran .....                                  | 108 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                           |     |
| <b>LAMPIRAN</b>                                 |     |



## DAFTAR TABEL

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Tabel 1.1  | Data kemiskinan di Provinsi Lampung .....                      | 4  |
| Tabel 1.2  | Sumber Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.....                    | 7  |
| Tabel 1.3  | Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa<br>2019.....         | 9  |
| Tabel 1.4  | Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa<br>2019.....         | 10 |
| Tabel 3.1  | Definisi operasional variable.....                             | 34 |
| Tabel 4.1  | Daftar Nama Gubernur Provinsi Lampung dan Masa<br>Jabatan..... | 39 |
| Tabel 4.2  | Jumlah Penduduk Provinsi Lampung .....                         | 40 |
| Tabel 4.3  | Jumlah Lembaga Pendidikan Provinsi Lampung .....               | 40 |
| Tabel 4.4  | Uji Normalitas Olah Data Aplikasi SPSS .....                   | 50 |
| Tabel 4.5  | Uji Multikolinieritas Olah Data Aplikasi SPSS .....            | 51 |
| Tabel 4.6  | Uji Heteroskedastisitas Olah Data Aplikasi SPSS .....          | 51 |
| Tabel 4.7  | Uji Autokorelasi Olah Data Aplikasi SPSS.....                  | 52 |
| Tabel 4.8  | Kriteria Penilaian Durbin-Watson.....                          | 52 |
| Tabel 4.9  | Model Summary Analisis Regresi Linier.....                     | 53 |
| Tabel 4.10 | Uji Analisis Regresi Linear Sederhana .....                    | 53 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 2.1 Mekanisme Transfer APBN Dana Desa.....                     | 21 |
| Gambar 2.2 Kerangka Berfikir .....                                    | 31 |
| Gambar 4.1 Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan<br>Nawacita ..... | 42 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Dalam memahami judul skripsi ini diperlukan uraian terhadap penegasan judul agar pembaca dapat lebih mudah dalam memahami maksud sekaligus tujuan dari judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2015-2020” penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi sebagai berikut :

1. Pengaruh, adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda ) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.<sup>1</sup>
2. Kebijakan Dana Desa, adalah kebijakan pemerintah melalui dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>2</sup>
3. Kemiskinan, adalah masyarakat yang memang dalam kondisi miskin, yaitu miskin sumber daya, miskin produktivitas, miskin pendapatan, miskin tabungan dan miskin investasi.<sup>3</sup>
4. Perspektif, adalah sudut pandang, pandangan, atau cara melukiskan suatu benda menurut pandangan nya.<sup>4</sup>
5. Ekonomi Islam, menurut Abdul Mun'in Al-Jamal ekonomi islam merupakan kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/perngaruh.html>, senin 22 april, 14.29 WIB

<sup>2</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>, rabu 29 januari 2020, 17.12 WIB

<sup>3</sup> Dr.Supramono,M.Si, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), h.232.

<sup>4</sup> <https://kbbi.web.id/perspektif.html> senin 22 april, 15.04 WIB

<sup>5</sup> Dr.Rozalinda, M.Ag, *Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.2.

Berdasarkan uraian tersebut variabel yang dibahas terkait permasalahan tersebut ada 2 yaitu kebijakan dana desa, dan kemiskinan yang dilihat dari pandangan ekonomi islam.

## **B. Latar Belakang**

Kemiskinan (*poverty*) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang. Masalah kemiskinan merupakan suatu yang kompleks, baik dilihat dari penyebabnya maupun dilihat dari ukurannya. Hal ini dikarenakan kemiskinan bersifat multidimensional, artinya kemiskinan menyangkut seluruh dimensi kebutuhan manusia yang sifatnya sangat beragam. Selain itu, dimensi kebutuhan manusia yang beraneka ragam itupun saling terkait satu dengan lainnya. Indonesia pada masa sebelum terjadi krisis ekonomi sering dijuluki sebagai “macan asia” karna pada waktu itu Indonesia diramalkan menjadi salah satu negara di Asia yang mampu tumbuh berkembang menyamai Jepang, Korea, dan Cina. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% per tahun pada masa itu, masalah kemiskinan sudah ada dalam perekonomian Indonesia.<sup>6</sup> Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia melahirkan implikasi pada kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Dalam kerangka otonomi desa, segala bentuk urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa maupun dalam membangun desa itu sendiri.<sup>7</sup>

Pembangunan itu bersifat dinamis dan multidimensional, pembangunan dilakukan untuk mencapai sasaran utama yaitu kesejahteraan masyarakat di suatu Negara atau daerah. Menurut Indradewi dan Marhaeni salah satu cara meningkatkan pendapatan masyarakat agar dapat merasakan kehidupan yang layak adalah melalui pembangunan ekonomi yang merata di setiap wilayah.

---

<sup>6</sup> Dr.Supramono, *Op.Cit.*, h. 230.

<sup>7</sup> Dianti Lalira, Amran T. Nakoko, Ita Pingkan F. Rorong, “*Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*”. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.18 No.04, 2018, Hal 63.



Pembangunan dapat berupa sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung semua sektor yang ada dan pengentasan masalah kemiskinan guna meningkatkan pendapatan penduduk miskin. Persoalan utama yang dapat menghambat pembangunan salah satunya yaitu kemiskinan. Masih adanya penduduk miskin di beberapa wilayah artinya strategi pemerintah untuk menaikkan taraf hidup masyarakatnya belum benar-benar efektif dilaksanakan.<sup>8</sup>

Pada umumnya di dalam rumah tangga miskin penghasilan per hari sangat diprioritaskan karena konsumsinya hari ini sangat bergantung pada penghasilannya hari ini juga. Rumah tangga miskin dalam mempertahankan kehidupannya selalu memikirkan sisi pengeluaran dan sisi pendapatannya, dimana rumah tangga miskin selaiu berupaya meminimalkan pengeluarannya dan memaksimalkan pendapatannya. Upaya itu dilakukan semata - mata untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak bagi rumah tangga miskin sangat sulit dicapai hanya dengan upaya - upaya seperti itu. Pendapatan yang sedikit yang hanya dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari hari, membuat orang - orang yang berada dibawah kemiskinan harus bekerja keras setiap harinya. Peran pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk membantu rumah tangga miskin agar dapat hidup dengan layak.<sup>9</sup>

Kemiskinan memang merupakan masalah yang umum yang dapat menyerang daerah manapun dan kemiskinan sendiri menjadi masalah yang sangat besar karena melibatkan berbagai aspek kehidupan, karena substansi kemiskinan merupakan kondisi serba kekurangan terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar, berupa makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan untuk

---

<sup>8</sup> Made Krisna Kalpika Sunu, Made Suyana Utama, “Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali”, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 8.8 (2019):843-872, ISSN : 2337-3067, Hal 845.

<sup>9</sup> Ibid, Hal 846.

mendapatkan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya untuk mendapatkan pendidikan maupun pekerjaan.<sup>10</sup>

Maka dari itu PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam sidang ke-70 membahas agenda tentang SDGs, di dalam sidang umum PBB ke-70 dan adopsi agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang berlangsung 24-27 september 2015 di New York, Kantor Staf Presiden (KSP) bersama dengan Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Luar Negeri, serta koalisi organisasi masyarakat sipil (Infid, Transparency International, Human-Right Watch, dan Cisdri .) menyelenggarakan sejumlah side-event yang menegaskan komitmen Indonesia dalam SDGs.<sup>11</sup>

Ishartono dan Santoso Tri Raharjo mengatakan, SDGs sendiri merupakan indikator yang menjadi tujuan Indonesia untuk memajukan pembangunan antar desa, tepatnya ada 17 indikator yang terdapat dalam SDGs sendiri, SDGs lebih global dalam mengkolaborasikan program-programnya. Sedangkan MDGs sebelumnya dibuat oleh anggota negara The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan beberapa lembaga internasional. Sementara SDGs dibuat secara detail dengan negosiasi internasional yang juga terdiri dari negara berpendapatan menengah dan rendah.<sup>12</sup>

Fahmi Irhamsyah pada tahun 2019 mengatakan, SDGs sebagai agenda Global harus disikapi dengan bijak, karena terdapat sebuah peribahasa bahwa sebagai bangsa kita perlu berfikir global dan bertindak lokal ” Think Globally and Act Locally”.<sup>13</sup>

Mengutip situs resmi Bappenas yang membahas mengenai SDGs dikatakan, tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable

---

<sup>10</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 65.

<sup>11</sup> <https://www.ksp.go.id/di-sidang-umum-pbb-indonesia-pastikan-agenda-sdgs-berjalan.html>, Diakses tanggal, 12 Agustus 2021 , 13.59 WIB

<sup>12</sup> Ishartono dan Santoso Tri Raharjo, “*Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*”, *Social Work Journal*, Vol 6, No 2 (2016), h. 165

<sup>13</sup> Fahmi Irhamsyah, “*Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional*”, *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Vol 7 No 2 (2019), h. 51

Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.<sup>14</sup>

Penyebab kemiskinan sendiri ada empat faktor yang mempengaruhi dan menjadi penyebab utama kemiskinan tersebut. Pertama, faktor individual, di mana seseorang menjadi miskin karena faktor pribadinya, seperti cacat permanen yang menyebabkan ia menjadi miskin. Kedua, faktor sosial, di mana kemiskinan terjadi akibat diskriminasi sosial yang dilakukan. Ketiga, faktor kultural, di mana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya., seperti malas untuk bekerja dan berusaha. Keempat, faktor struktural, di mana kemiskinan terjadi akibat ketidakadilan sistem ekonomi, orang menjadi miskin akibat di miskinakan oleh sistem yang ada.<sup>15</sup>

Menanggapi permasalahan tersebut, maka strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengatasi

---

<sup>14</sup> <http://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>, Diakses Tanggal, 12 Agustus 2021, 14.17 WIB

<sup>15</sup> Suharto, Edi, “*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*”, (Bandung: PT Rafika Aditama 2009), h. 7

masalah tersebut yaitu melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi dan memberi perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat desa. Dalam mewujudkan pembangunan desa pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia, sehingga Indonesia memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Kemiskinan bukan hanya masalah Indonesia, kemiskinan juga masalah tiap-tiap daerah yang berada di Indonesia khusus nya Provinsi Lampung, di Provinsi Lampung sendiri jumlah kemiskinan cukup fluktuatif mulai dari penduduk miskin garis kemiskinan dan variabel kemiskinan lainnya, banyak faktor yang cukup mempengaruhi kemiskinan tersebut.

Mengutip website resmi BPS Provinsi Lampung, kemiskinan di Provinsi Lampung berdasarkan jumlah penduduk tahun 2020 berada di tingkat 12,76 % sedangkan mengacu pada ibukota yaitu Jakarta pada tahun 2020 tingkat Kemiskinan adalah 3,42 persen atau sebesar 362,30 ribu orang artinya masi perlu kerja ekstra untuk Pemerintah Provinsi Lampung khususnya melalui kebijakan-kebijakan untuk menekan laju Kemiskinan di Lampung.<sup>17</sup> Akan tetapi Provinsi Lampung masih lebih baik dari Palembang yang tingkat Kemiskinan nya sebesar 13,02 %, hal ini tentu bisa menjadi tugas maupun tolak

---

<sup>16</sup> Nilam Indah Susilowati, Dwi Susilowati, Samsul Hadi, Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Belanja Modal dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vo; 1 Tahun 2017. h 26

<sup>17</sup> <https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/479/persentase-penduduk-miskin-di-dki-jakarta-pada-september-2019-sebesar-3-42-persen.html>, Rabu 30 Juni 2021, 14.10 WIB

ukur untuk pemerintah memperbaiki masalah kemiskinan di Lampung khususnya.<sup>18</sup>

<sup>19</sup>Berikut data kemiskinan di Provinsi Lampung dalam jumlah penduduk periode 2015-2020 :

**Tabel 1.1**  
**Data kemiskinan di Provinsi Lampung dalam jumlah penduduk**  
**periode 2015-2020**

\*Dalam Ribuan Rupiah

| No. | Tahun | Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung (Ribu) | Persentase Kemiskinan Provinsi Lampung |
|-----|-------|--|--|
| 1   | 2015  | 1100,68  | 13,53%                                 |
| 2   | 2016  | 1139,78  | 13,86%                                 |
| 3   | 2017  | 1131,73  | 13,69%                                 |
| 4   | 2018  | 1091,6   | 13,01%                                 |
| 5   | 2019  | 1040   | 12,30%                                 |
| 6   | 2020  | 1091,14  | 12,76%                                 |

*Sumber : lampung.bps.go.id*

Pada tahun 2015 tingkat kemiskinan provinsi lampung sekitar 1100,68 (13,53%) lalu meningkat pada tahun 2016 menjadi 1139,78 (13,86%) lalu turun di tahun berikutnya, dan naik kembali pada tahun 2020 sebesar 1091,14 (12,76%).

Hal ini perlu menjadi perhatian bersama baik masyarakat maupun pemerintah Provinsi Lampung terkait terjadi nya peningkatan jumlah penduduk miskin yang mempengaruhi persentase kemiskinan pada tahun 2016 dan 2019, apa yang menjadi pengaruh dan naik nya jumlah penduduk miskin tersebut.

---

<sup>18</sup> <https://palembangkota.bps.go.id/pressrelease/2020/04/28/440/profil-kemiskinan-kota-palembang-maret-2019.html>, Rabu 30 Juni 2021, 14.12 WIB

<sup>19</sup> <https://lampung.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewtab5>, Kamis 17 januari 2019, 19.48 WIB



Menurut Itang Itang Tahun 2015 berdasarkan kesimpulan penelitian nya, mengutip BPS, bahwa ada beberapa faktor penyebab naiknya kemiskinan yaitu, pendidikan yang rendah, malas bekerja, keterbatasan sumber daya alam, terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan modal, beban tanggungan keluarga.<sup>20</sup>

Di luar faktor itu Booth dan Mc Cawley mengatakan bahwa, di banyak negara memang terjadi kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapitanya, tetapi itu hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakatnya, sedangkan sebagian besar masyarakat miskin kurang memperoleh manfaat apa-apa, bahkan sangat dirugikan.<sup>21</sup>

Dalam pandangan Islam sendiri menurut Fika Fitrisari, Sinergi ekonomi islam diperlukan untuk menggerakkan perekonomian Indonesia. Ekonomi Islam mampu memberikan nilai dan perilaku serta moral dan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial dengan tidak melihat perbedaan dalam klasifikasi kehidupan masyarakat. Peran ekonomi Islam dalam menanggulangi tingkat kesenjangan sosial yaitu bahwa semua manusia yang hidup dalam masyarakat dituntut untuk bekerja (berusaha) memenuhi kebutuhan serta memanfaatkan potensi yang dimiliki, kemudian pengelolaan zakat, infaq dan sedekah harus diperbaiki sehingga bisa tersalurkan secara adil, pengentasan masalah kemiskinan dapat diminimalisir dengan adanya campur tangan pemerintah.<sup>22</sup>

Di Provinsi Lampung mayoritas penduduk beragama islam, dan Islam tidak memandang kemiskinan sebagai sebuah keadaan atau takdir yang harus dinikmati oleh orang yang terkena nasib miskin, namun Islam mengajarkan betapa pentingnya potensi dan kemampuan yang ada di setiap insan untuk dikelola dan

---

<sup>20</sup> Itang Itang, "Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan", Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol 16 No 01 (2015), h 21-22

<sup>21</sup> Anne Booth, Peter Mc Cawley, "Ekonomi Orde Baru" (Jakarta : LP3ES, 1982), h.48

<sup>22</sup> Fika Fitrisari, "Sinergi Ekonomi Islam Untuk Menanggulangi Kemiskinan", Jurnal Universitas Muhamadiyah Malang, Vol. 7 No. 1 April 2016

dikembangkan untuk menghindari mereka dari keadaan miskin, dengan berbagai cara yang efektif dan dinamis.<sup>23</sup>

Berikut ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai kemiskinan

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا

*Artinya : Dan memberikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga bagi orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*<sup>24</sup> (Q.S Al-Isra 26)

Berdasarkan ayat tersebut dapat di tafsirkan, *Dan diberikanlah haknya kepada keluarga-keluarga yang dekat*, dari pihak ibu atau bapak, bantuan, kebajikan, dan silaturahmi. Demikian *juga untuk orang miskin dan orang yang dalam perjalanan*, diberikanlah zakat yang diminta atas kamu, sedekah yang diminta atau bantuan lain yang diperlukan, *dan janganlah kamu menghamburkan hartamu dengan boros* dengan membelanjakannya pada hal hal yang tidak ada kemaslahatan.<sup>25</sup>

Menurut Al-Ghozali, mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan material dan kebutuhan rohani. Pendapat tersebut dibuat oleh Ahmed, kemiskinan bukan hanya perampasan barang dan jasa, tetapi kurangnya kemiskinan dalam roh. Islam menganggap kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan ahlak, keluarga dan juga masyarakat. Dengan demikian kemiskinan mempunyai dampak buruk terhadap masyarakat yang mengalami situasi tersebut. Al- Qur'an memberikan peringatan terhadap orang yang mampu untuk menyedekahkan hartanya kepada fakir miskin

<sup>23</sup>Firman Setiawan, dan Iswatul Hasanah, "Kemiskinan Dan Pengentasannya Dalam Pandangan Islam", Jurnal DINAR Ekonomi Syariah Vol. 1 (1), 2016

<sup>24</sup> Kitab Al-Qur'an, Al Isra 26

<sup>25</sup> Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zilalil Qur'an (Al-Qur'an: Surah Al-Isra 26), 2003, Jakarta: Gema Insani, Hal. 28

untuk mencari keridhaan semata , seperti yang dijelaskan dalam surah Ar-Rum berikut:<sup>26</sup>

فَاتِّدَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

*Artinya : Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.*

Berdasarkan ayat tersebut maka ditafsirkan, Setelah menginformasikan cara membantu orang lain dengan benar melalui zakat, infak, dan sedekah yang dilandasi keikhlasan, melalui ayat ini Allah memperingatkan para pemakan riba dan orang yang menyembunyikan tujuan buruk di balik bantuannya. *Dan sesuatu riba yang kamu berikan kepada orang yang terbiasa memakan riba agar harta manusia yang diberi itu semakin bertambah, maka sesungguhnya harta tersebut tidak bertambah dalam pandangan Allah dan tidak pula diberkahi. Dan apa yang kamu berikan kepada orang lain berupa zakat, infak, dan sedekah yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya dengan cara yang benar dan bermartabat.*<sup>27</sup>

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah dana desa melalui pengalokasian Dana Desa merupakan faktor yang terpenting dan secara langsung mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu daerah terutama di Provinsi Lampung.

Dana Desa sendiri adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

<sup>26</sup> Kitab *Al-Qur'an* Q.S Ar-Rum ayat 38

<sup>27</sup> Quraish Shihab, "*Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesa, dan keserasian al-Qur'an*", 2002, Jakarta: lentera Hati, hal.36

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>28</sup> Belanja negara adalah keharusan pemerintah pusat yang dinyatakan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.<sup>29</sup>

Di Provinsi Lampung sendiri masih banyak desa-desa yang sedang dalam pembangunan, dan Provinsi Lampung sendiri termasuk provinsi yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan per-desa.

Dana Desa sendiri di dalam islam menurut Nurhayati dan Muh Saleh Ridwan berdasarkan kesimpulan penelitian yang dilakukan bahwa, dalam Islam diajarkan untuk selalu menanamkan sifat keterbukaan dan kejujuran dalam menjalan suatu perencanaan dalam hidup baik dalam bentuk individu maupun bermasyarakat. Sama halnya dalam pengelolaan alokasi Dana Desa kita senantiasa menerapkan sistem transparansi/Tabligh dan akuntabilitas/amanah karena hukumnya adalah wajib dan jika melanggar berarti kita telah melakukan kemaksiatan yang akan menghapus segala amal ibadah kepada allah. Sebagaimana tertuang dalam alqur'an surah an-nahl ayat 101 mengenai transparansi dan surah al-ahزاب ayat 72-73.<sup>30</sup>

<sup>31</sup>Berikut merupakan sumber Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dikutip dari BPS (2015-2020):

---

<sup>28</sup> A Saibani. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (jakarta, Media Pustaka.2014), h. 4

<sup>29</sup> Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

<sup>30</sup> Nurhayati, Muh Saleh Ridwan, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Vol 1 No.1 (2019) h.78

<sup>31</sup> <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>, Kamis, 19 Maret 2020, 14.19 WIB

**Tabel 1.2**  
**Sumber Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015-2020**

\*Dalam Ribuan Rupiah

| No | Tahun | Jumlah Desa | Alokasi dasar |               | Alokasi Formula | Jumlah        |
|----|-------|-------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|    |       |             | Per desa      | Per kab       |                 |               |
| 1  | 2015  | 2.435       | 253.082       | 616.254.888   | 68.472.765      | 684.727.653   |
| 2  | 2016  | 2.435       | 565.640       | 1.377.333.400 | 159.528.650     | 1.536.762.050 |
| 3  | 2017  | 2.435       | 720.442       | 1.754.276.270 | 203.211.451     | 1.957.487.721 |
| 4  | 2018  | 2.435       | 616.345       | 1.500.800.075 | 449.115.728     | 2.091.398.105 |
| 5  | 2019  | 2.435       | 672.421       | 1.637.345.135 | 631.509.679     | 2.268.854.814 |
| 6  | 2020  | 2.435       | 662.806       | 1.613.932.610 | 715.604.494     | 2.329.537.104 |

Sumber : DJPK(Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) Kementerian Keuangan tahun 2015-2020

Terlihat dari tabel diatas alokasi dasar (dana per kabupaten) merupakan 90% dari jumlah Dana Desa sedangkan alokasi formula diambil dari sisa 10% dari jumlah Dana Desa, dan dana per desa di tetapkan melalui dana per kab dibagi jumlah desa lalu hasil nya adalah dana per desa, dan jika dilihat dari tabel tersebut dana per desa semakin meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2020, bahkan di tahun 2015-2016 kenaikan lebih dari 2 kali lipat cukup besar dibanding tahun yang lain.

Berdasarkan data tersebut, pencairan yang dilakukan tiap daerah di Provinsi Lampung melalui kebijakan pemerintah dirasakan kurang maksimal. Pada tahun 2019 tepat nya di salah satu kabupaten Provinsi Lampung, pada penyaluran Dana Desa tahap I, menurut kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Wirham Riadi menjelaskan, dari 264 desa yang tersebar di 24 kecamatan di Lampung Timur, terdapat 2 desa yang belum menyampaikan usulan pencairan Dana Desa, dan salah satu desa dari

kedua desa tersebut masih terdapat permasalahan Dana Desa tahun 2018 silam yang belum terselesaikan.<sup>32</sup>

Alasan penelitian ini diperkuat dengan permasalahan **Korupsi** yang terjadi di dilakukan oleh Mantan Kepala Desa Labuhan Jaya Gunung Labuhan Way Kanan dengan data Dana Desa tahun 2018-2019 dengan mengutip situs resmi **Putusan Mahkamah Agung** dan didakwa menggunakan anggaran dana desa untuk kepentingan pribadi. Diungkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Waykanan Marimbun Pangabea dalam dakwaannya. “Yang dimana sebagian dana desa sebesar Rp991.877.860 separuhnya sebesar Rp675.582.560,00 terdakwa pakai sendiri untuk kepentingan pribadinya.”<sup>33</sup> Pemerintah Provinsi Lampung terkait hal ini perlu melakukan pengawasan terutama dalam pengalokasian Dana Desa sendiri baik dari segi kebijakan, alokasi, dan transparansi dari tiap-tiap desa.

Penggunaan Dana Desa tidak dapat secara langsung untuk mengatasi Kemiskinan, diperlukan pendanaan terkait pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran, contoh nya seperti mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa di tiap-tiap desa. Untuk secara langsung membantu masyarakat yang belum memiliki pekerjaan untuk bekerja dalam BUMDes tersebut, dan dana hasil pendapatan BUMDes sendiri dapat dialokasikan untuk segala kegiatan dan keperluan desa serta sebagai upah bagi para masyarakat yang bekerja.

<sup>34</sup>Untuk memperkuat penelitian ini, terdapat 2 sampel rincian Dana Desa/ Dana APBDesa dari 2 desa di Provinsi Lampung , untuk menjadi tolak ukur sekaligus gambaran mengenai penelitian ini. Berikut data sampel 2 desa di Provinsi Lampung, berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh perangkat desa terkait :

---

<sup>32</sup> <https://bandarlampung.bpk.go.id/?p=11617>, Kamis 19 Maret 2020, 14.45 WIB

<sup>33</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9951e58b78a8133f1643a0fd69a538c7.html>

<sup>34</sup> Andri Kurniawan, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes.P) Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019”, h 1-7

**Tabel 1.3**  
**Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2019**  
**Desa Bumsari Natar (Lampung Selatan)**

| No                       | Uraian  | Anggaran RP                      |                                  | Bertambah<br>(Berkurang<br>) |
|--------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|                          |   | Semula                           | Menjadi                          |                              |
| <b>A</b>                 | <b>Pendapatan</b>   |                                  |                                  |                              |
| 1                        | <b>Pendapatan Asli Desa</b>   | <b>Rp<br/>13.450.000</b>         | <b>Rp<br/>13.450.000</b>         | Rp<br>-                      |
|                          | Hasil Usaha Desa  | Rp<br>13.450.000                 | Rp<br>13.450.000                 | Rp<br>-                      |
| 2                        | <b>Pendapatan Transfer</b>  | <b>Rp<br/>1.353.242.8<br/>84</b> | <b>Rp<br/>1.357.351.88<br/>4</b> | Rp<br>4.109.000              |
|                          | Dana Desa   | Rp<br>932.281.917                | Rp<br>932.281.917                | Rp<br>-                      |
|                          | Alokasi Dana Desa   | Rp<br>420.960.967                | Rp<br>421.319.967                | Rp<br>359.000                |
|                          | Bantuan Keuangan<br>Kabupaten/Kota  | Rp<br>-                          | Rp<br>3.750.000                  | Rp<br>3.750.000              |
| 3                        | <b>Pendapatan Lain-Lain</b>   | <b>Rp<br/>1.127.044</b>          | <b>Rp<br/>1.127.044</b>          | Rp<br>-                      |
|                          | Bunga Bank  | Rp<br>1.127.044                  | Rp<br>1.127.044                  | Rp<br>-                      |
| <b>Jumlah Pendapatan</b> |   | <b>Rp<br/>1.367.819.9<br/>28</b> | <b>Rp<br/>1.371.928.92<br/>8</b> | <b>Rp<br/>4.109.000</b>      |
| <b>B</b>                 | <b>Belanja</b>  |                                  |                                  |                              |
| 1                        | <b>Bidang Penyelenggaraan<br/>Pemerintah Desa (Rincian di<br/>Lampiran)</b> | Rp<br>439.002.113                | Rp<br>446.311.113                | Rp<br>885.313.226            |
| 2                        | <b>Bidang Pelaksanaan<br/>Pembangunan Desa (Rincian<br/>di Lampiran)</b>    | Rp<br>775.576.864                | Rp<br>796.861.364                | Rp<br>1.572.438.2<br>28      |
| 3                        | <b>Bidang Pembinaan<br/>Kemasyarakatan (Rincian di</b>                      | Rp<br>112.000.200                | Rp<br>93.354.200                 | Rp<br>205.354.400            |



|  |  |                             |                             |                         |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  | <b>Lampiran)</b>   |                             |                             |                         |
| 4  | <b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Rincian di Lampiran)</b>                            | Rp<br>26.490.000            | Rp<br>20.891.500            | Rp<br>47.381.500        |
| 5  | <b>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa (Rincian di Lampiran)</b> | Rp<br>9.371.567             | Rp<br>10.131.567            | Rp<br>19.503.134        |
| <b>Jumlah Belanja</b>                          |  | <b>Rp<br/>1.362.440.744</b> | <b>Rp<br/>1.366.549.744</b> | <b>Rp<br/>4.109.000</b> |
| <b>Surplus/ (Defisit)</b>                      |  | <b>Rp<br/>5.379.184</b>     | <b>Rp<br/>5.379.184</b>     | <b>Rp<br/>-</b>         |
| <b>C</b>                                       | <b>Pembiayaan</b>  |                             |                             |                         |
| 1  | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>   | Rp<br>40.620.816            | Rp<br>40.620.816            | Rp<br>-                 |
|  | SILPA Tahun Sebelumnya   | Rp<br>40.620.816            | Rp<br>40.620.816            | Rp<br>-                 |
| 2  | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>  | Rp<br>46.000.000            | Rp<br>46.000.000            | Rp<br>-                 |
|  | Penyertaan Modal Desa  | Rp<br>46.000.000            | Rp<br>46.000.000            | Rp<br>-                 |
|  | <b>Pembiayaan NETTC</b>  | <b>-Rp<br/>5.379.184</b>    | <b>-Rp<br/>5.379.184</b>    | <b>Rp<br/>-</b>         |
| <b>Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran</b> |  | <b>Rp<br/>-</b>             | <b>Rp<br/>-</b>             | <b>Rp<br/>-</b>         |

Sumber : APBDesa Bumisari Natar (Lampung Selatan)

<sup>35</sup>Data tersebut diperkuat dengan ada nya Badan Usaha Desa yang dikelola oleh Desa Bumisari, ada 3 badan usaha yang berjalan yaitu BRI Link, Koperasi Simpan Pinjam, dan Jasa Pembuangan Sampah Desa (Terdapat di Lampiran). Pembiayaan desa pada tahun 2019 kepada Badan Usaha sebesar Rp. 46.000.000, yang menghasilkan pendapatan desa sebesar Rp. 13.450.000 dan dana pembiayaan

---

<sup>35</sup> Laporan Keuangan BUMDes “Desa Bumisari Natar Lampung Selatan Tahun 2019”

tersebut masi terdapat sisa di masing-masing Badan Usaha dengan rincian sebagai berikut :

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| BRI Link               | : Rp 5.362.000 |
| Koperasi Simpan Pinjam | : Rp 1.620.000 |
| Jasa Pembuangan Sampah | : Rp 2.700.000 |

Badan Usaha yang di kelola langsung oleh Desa Bumisari secara langsung dapat membantu pendapatan dari desa sendiri apabila dapat dikelola dengan baik, selain dari Dana Desa pendapatan juga didapatkan melalui BUMDes.

Berbeda dengan desa Bumisari pada desa Merak Batin tidak terdapat BUMDes yang dikelola oleh desa, sumber pendapatan pada desa Merak Batin bergantung pada Dana Desa bantuan keuangan Kabupaten dan Kota serta Bunga Bank, hal ini tentu menjadi kekurangan dari desa Merak Batin sendiri dikarenakan BUMDes sendiri berperan penting guna membantu pendapatan Desa Merak Batin.

<sup>36</sup>Berikut sampel data Dana Desa, desa Merak Batin Lampung Selatan :

**Tabel 1.4**

**Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2019**  
**Desa Merak Batin Natar (Lampung Selatan)**

| No       | Uraian                     | Anggaran RP                 |                             | Bertambah<br>(Berkurang) |
|----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|          |                            | Semula                      | Menjadi                     |                          |
| <b>A</b> | <b>Pendapatan</b>          |                             |                             |                          |
| 1        | <b>Pendapatan Transfer</b> | <b>Rp<br/>1.645.964.722</b> | <b>Rp<br/>1.652.923.722</b> | Rp<br>6.959.000          |
|          | Dana Desa                  | Rp<br>1.173.692.971         | Rp<br>1.173.692.971         | Rp<br>-                  |

<sup>36</sup> Andi Susanto, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes.P) Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019”, h 1-7

|                           |  |                                   |                                   |                                  |
|---------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|                           | Alokasi Dana Desa  | Rp<br>472.271.751                 | Rp<br>472.630.751                 | Rp<br>359.000                    |
|                           | Bantuan Keuangan<br>Kabupaten/Kota   | Rp<br>-                           | Rp<br>6.600.000                   | Rp<br>6.600.000                  |
| 2                         | <b>Pendapatan Lain-Lain</b>  | <b>Rp</b><br>-                    | <b>Rp</b><br>-                    | Rp<br>-                          |
|                           | Bunga Bank   | Rp<br>-                           | Rp<br>-                           | Rp<br>-                          |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>  |  | <b>Rp</b><br><b>1.645.964.722</b> | <b>Rp</b><br><b>1.652.923.722</b> | <b>Rp</b><br><b>6.959.000</b>    |
| <b>B</b>                  | <b>Belanja</b>   |                                   |                                   |                                  |
| 1                         | <b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Rincian di Lampiran)</b>                    | Rp<br>527.310.493                 | Rp<br>523.534.493                 | -Rp<br>3.776.000                 |
| 2                         | <b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Rincian di Lampiran)</b>                       | Rp<br>1.095.682.750               | Rp<br>997.631.750                 | -Rp<br>98.051.000                |
| 3                         | <b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (Rincian di Lampiran)</b>                           | Rp<br>81.965.080                  | Rp<br>50.575.080                  | -Rp<br>31.390.000                |
| 4                         | <b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Rincian di Lampiran)</b>                            | Rp<br>151.302.000                 | Rp<br>46.188.000                  | -Rp<br>105.144.000               |
| 5                         | <b>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa (Rincian di Lampiran)</b> | Rp<br>5.503.221                   | Rp<br>7.793.221                   | Rp<br>2.290.000                  |
| <b>Jumlah Belanja</b>     |  | <b>Rp</b><br><b>1.861.763.544</b> | <b>Rp</b><br><b>1.625.722.544</b> | <b>-Rp</b><br><b>236.041.000</b> |
| <b>Surplus/ (Defisit)</b> |  | <b>-Rp</b><br><b>215.798.822</b>  | <b>Rp</b><br><b>27.201.178</b>    | <b>Rp</b><br><b>243.000.000</b>  |
| <b>C</b>                  | <b>Pembiayaan</b>  |                                   |                                   |                                  |
| 1                         | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>   | Rp<br>273.798.822                 | Rp<br>273.798.822                 | Rp<br>-                          |

|   |  |                           |                           |                           |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   | SILPA Tahun<br>Sebelumnya                          | Rp<br>273.798.822         | Rp<br>273.798.822         | Rp<br>-                   |
| 2 | <b>Pengeluaran<br/>Pembiayaan</b>                  | Rp<br>58.000.000          | Rp<br>301.000.000         | Rp<br>243.000.000         |
|   | Penyertaan Modal Desa                              | Rp<br>58.000.000          | Rp<br>301.000.000         | Rp<br>243.000.000         |
|   | <b>Pembiayaan NETTC</b>                            | <b>Rp<br/>215.798.822</b> | <b>-Rp<br/>27.201.178</b> | <b>Rp<br/>243.000.000</b> |
|   | <b>Sisa Lebih/(Kurang)<br/>Pembiayaan Anggaran</b> | <b>Rp<br/>-</b>           | <b>Rp<br/>-</b>           | <b>Rp<br/>-</b>           |

Sumber : APBDesa Merak Batin Natar (Lampung Selatan)

Data diatas merupakan data yang bersumber dari APBDesa dan merupakan data valid berdasarkan perhitungan tahun 2019, dari data diatas dapat terlihat bahwa setiap desa memiliki kepentingan nya sendiri dalam mengatur pendapatan maupun belanja desa tergantung kebutuhan desa tersebut, dalam data Desa Bumisari terdapat hasil usaha desa yang menjadi nilai tambah bagi desa tersebut yang kemudian dapat membantu anggaran dari desa tersebut, sedangkan di Desa Merak Batin tidak ada, kemudian pada kolom Surplus (Defisit) terdapat perbedaan signifikan yakni terdapat defisit pada desa merak batin walaupun setelahnya menjadi Surplus. Kesimpulan nya setiap desa memiliki pendapatan dan belanja yang berbeda-beda tergantung pada tingkat kebutuhan nya, permasalahan terbesar yang harus di hadapi dari setiap desa adalah sesuai atau tidaknya dengan variabel-variabel yang ditentukan oleh SDGs yang merupakan indikator atau bahan ukur kemajuan dari setiap desa tersebut, terutama dalam variabel Kemiskinan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas pengaruh Dana Desa terhadap kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Ishotono (2016) dengan judul “Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Pengentasan Kemiskinan” disimpulkan, pekerjaan sosial mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan masalah kemiskinan. Sudah berabad-abad profesi ini bergelut dan terlibat dalam penanganan kemiskinan. Secara historis profesi Pekerjaan Sosial boleh dikatakan lahir dari masalah kemiskinan. Profesi ini bahkan menempatkan masalah kemiskinan

sebagai bidang utama yang ditangani Pekerjaan Sosial. Jika sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak-Hak Azasi Manusia, Pekerjaan Sosial harus berada di garis depan dalam upaya mengatasi kemiskinan. MDGs yang kemudian bergeser ke SDGs merupakan tujuan bersama yang memerlukan pengalawan bersama baik vertical maupun horizontal.<sup>37</sup>

Intan Mala Sari, M Faisal Abdullah (2017) “Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung” disimpulkan, hasil analisis regresi data panel dengan model terpilih adalah *Fixed Effect Model* menunjukkan bahwa terjadi perbedaan kemiskinan desa di kabupaten Tulungagung antara tahun 2015 dengan 2016, variabel yang digunakan dalam model yaitu Dana Desa dan ADD berpengaruh terhadap kemiskinan desa dengan nilai masing-masing -4,52 untuk Dana Desa dan -1,52 untuk ADD. Sedangkan nilai koefisien variabel Dana Desa dan ADD dalam menjelaskan desa adalah 99%, Dana Desa dan ADD berhasil dan efektif mengurangi kemiskinan pada 13 desa di Kabupaten Tulungagung.<sup>38</sup>

Nurhayati dan Muh Saleh Ridwan (2019) “Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam”, berdasarkan kesimpulan penelitian yang dilakukan bahwa, dalam Islam diajarkan untuk selalu menanamkan sifat keterbukaan dan kejujuran dalam menjalankan suatu perencanaan dalam hidup baik dalam bentuk individu maupun bermasyarakat. Sama halnya dalam pengelolaan alokasi Dana Desa kita senantiasa menerapkan sistem transparansi/Tabligh dan akuntabilitas/amanah karena hukumnya adalah wajib dan jika melanggar berarti kita telah melakukan kemaksiatan yang akan menghapus segala amal ibadah kepada Allah. Sebagaimana tertuang dalam alqur'an surah an-nahl ayat 101 mengenai transparansi dan surah al-ahزاب ayat 72-73.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Ishatono, “*Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Pengentasan Kemiskinan*”, Social Work Jurnal (2016) Vol 6, No 2, h 166

<sup>38</sup> Intan Mala Sari, M Faisal Abdullah, “Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung”, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (2017), Vol 15, No 1, h 46

<sup>39</sup> Nurhayati, Muh Saleh Ridwan, *Loc.Cit*

Dari 3 penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa selain dari kebijakan desa terkait pengaruh dana desa dapat ditimbulkan melalui faktor diluar kebijakan terkait efektifitas dari dana desa itu sendiri, hal ini menambah alasan peneliti untuk mencari tahu adakah pengaruh serta efektifitas Dana Desa terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung.

<sup>40</sup>Dalam Ekonomi Islam sendiri dijelaskan dalam Q.S Al-Isra Ayat 26 yang berbunyi:

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

*Artinya : "Dan memberikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga bagi orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros"*

Tafsir : *Dan berikanlah haknya kepada keluarga-keluarga yang dekat*, dari pihak ibu maupun bapak, berupa bantuan, kebajikan, dan silaturahmi. *Demikian juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan*, berikanlah zakat yang diwajibkan atas kamu, sedekah yang lebih disarankan atau bantuan lainnya yang diperlukan, *dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros* dengan membelanjakannya pada halhal yang tidak ada kemaslahatan.<sup>41</sup>

Dalam ayat diatas dijelaskan di tafsir “berikanlah zakat yang diwajibkan atas kamu, sedekah yang lebih disarankan atau bantuan lainnya yang diperlukan” Dana Desa merupakan bantuan yang diberikan pemerintah, bahwa tugas dari Dana Desa salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan, artinya berdasarkan ayat tersebut Dana Desa sendiri harus tepat sasaran dan jangan boros dipergunakan agar setiap warga miskin maupun masyarakat desa

---

<sup>40</sup> Q.S Al-Isra, ayat 26

<sup>41</sup> Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zilalil Qur'an (Al-Qur'an: Surah Al\_Isra 26), 2003, Jakarta: Gema Insani. h.15

dapat menikmati hasilnya dan memperoleh kemaslahatan bagi setiap warga desa.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan Dana Desa dalam mengatasi kemiskinan di Provinsi Lampung berdasarkan perspektif islam, mengutip APBDes desa Bumisari, terdapat pendanaan terkait pembangunan dan bantuan baik barang maupun jasa, kepada Taman Pendidikan Alqur'an dan Madrasah untuk memajukan pendidikan khususnya didalam Islam.<sup>42</sup>

Sehubungan dengan permasalahan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat permasalahan tersebut ke dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Dana Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2015-2019”.

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah adalah penetapan pembatasan dari masalah penelitian yang diidentifikasi. Dengan kata lain pembatasan masalah merupakan cakupan atau domain masalah yang akan diteliti.<sup>43</sup>

Untuk menghindari penyimpangan dari pokok permasalahan, peneliti hanya memfokuskan penelitian pada pengaruh variabel independen Dana Desa terhadap variabel dependen yakni Kemiskinan.

### **D. Rumusan Masalah**

Dari data di atas, peneliti menemukan beberapa pertanyaan dan menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh, pengalokasian, serta efektifitas kebijakan Dana Desa terhadap Kemiskinan di Provinsi

---

<sup>42</sup> Andri Kurniawan, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes.P) Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019”, h 3

<sup>43</sup> Pedoman Penulisan Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017/2018, h. 42



Lampung periode 2015-2019 menggunakan indikator SDG's ?

2. Bagaimana pandangan dalam Perspektif Ekonomi Islam mengenai pengalokasian serta kebijakan Dana Desa terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung ?

### **E. Tujuan dan Manfaat**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini, untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh, pengalokasian, serta efektifitas dari Dana Desa di Provinsi Lampung periode 2015-2019 menggunakan indikator SDGs, dan mengetahui bagaimana pengalokasian Dana Desa terhadap Kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat teoritis : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap pengaruh Dana Desa terhadap kemiskinan.

Manfaat praktis : penelitian ini diharapkan sebagai informasi bagi lembaga terkait dalam menentukan kebijakannya untuk menanggulangi kemiskinan di Provinsi Lampung.

### **F. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Kajian pustaka dalam penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu. Ini disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ishatono (2016) dengan judul “Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Pengentasan Kemiskinan” disimpulkan, pekerjaan sosial mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan masalah kemiskinan. Sudah berabad-abad profesi ini bergelut dan terlibat dalam penanganan kemiskinan. Secara historis profesi Pekerjaan Sosial boleh dikatakan lahir dari masalah kemiskinan. Profesi ini bahkan menempatkan masalah kemiskinan sebagai bidang utama yang ditangani Pekerjaan Sosial. Jika sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak-Hak Azasi Manusia, Pekerjaan Sosial harus berada di garis depan dalam upaya mengatasi kemiskinan. MDGs yang kemudian bergeser ke SDGs merupakan tujuan bersama yang memerlukan pengalawan bersama baik vertical maupun horizontal.<sup>44</sup>
2. Intan Mala Sari, M Faisal Abdullah (2017) “Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung” disimpulkan, hasil analisis regresi data panel dengan model terpilih adalah *Fixed Effect Model* menunjukan bahwa terjadi perbedaan kemiskinan desa di kabupaten Tulungagung antara tahun 2015 dengan 2016, variabel yang digunakan dalam model yaitu Dana Desa dan ADD berpengaruh terhadap kemiskinan desa dengan nilai masing-masing -4,52 untuk Dana Desa dan -1,52 untuk ADD. Sedangkan nilai koefisien variabel Dana Desa dan ADD dalam menjelaskan desa adalah 99%, Dana Desa dan ADD berhasil dan efektif mengurangi kemiskinan pada 13 desa di Kabupaten Tulungagung.<sup>45</sup>
3. Nurhayati dan Muh Saleh Ridwan (2019) “Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam”, berdasarkan

---

<sup>44</sup> Ishatono, “Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Pengentasan Kemiskinan”, Social Work Jurnal (2016) Vol 6, No 2, h 166

<sup>45</sup> Intan Mala Sari, M Faisal Abdullah, “Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung”, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (2017), Vol 15, No 1, h 46

kesimpulan penelitian yang dilakukan bahwa, dalam Islam diajarkan untuk selalu menanamkan sifat keterbukaan dan kejujuran dalam menjalan suatu perencanaan dalam hidup baik dalam bentuk individu maupun bermasyarakat. Sama halnya dalam pengelolaan alokasi Dana Desa kita senantiasa menerapkan sistem transparansi/Tabligh dan akuntabilitas/amanah karena hukumnya adalah wajib dan jika melanggar berarti kita telah melakukan kemaksiatan yang akan menghapus segala amal ibadah kepada allah. Sebagaimana tertuang dalam alqur'an surah an-nahl ayat 101 mengenai transparansi dan surah al-ahزاب ayat 72-73.<sup>46</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis. Hal ini penting untuk diperhatikan agar karya tulis yang dihasilkan bisa tersusun secara runtut dan rapi.<sup>47</sup> Berikut skema sistematika penulisan yang ditetapkan:

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Bab I:</b> | <b>Pendahuluan</b>                          |
|               | A. Penegasan Judul                          |
|               | B. Latar Belakang Masalah                   |
|               | C. Identifikasi dan Batasan Masalah         |
|               | D. Rumusan Masalah                          |
|               | E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian |
|               | F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan |
|               | G. Sistematika Penulisan                    |

<sup>46</sup> Nurhayati, Muh Saleh Ridwan, *Loc.Cit*

<sup>47</sup> Prof.Dr.Sugiyono,*Metode Penelitian pendidikan pendekatan kualitatif, kuantitatif dan R & D*, Cetakan ke- 23 (Bandung : Alfabeta, 2016). h 76

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Bab II:</b>        | <b>Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis</b><br>A. Teori Yang Digunakan Beserta Definisi<br>B. Pengajuan Hipotesis   |
| <b>Bab III:</b>       | <b>Metode Penelitian</b><br>A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian<br>B. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data<br>C. Definisi Operasional Variabel<br>D. Instrumen Penelitian<br>E. Uji Asumsi Klasik<br>F. Uji Hipotesis |
| <b>Bab IV:</b>        | <b>Hasil Penelitian dan Pembahasan</b><br>A. Deskripsi Data<br>B. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis  |
| <b>Bab V:</b>         | <b>Penutup</b><br>A. Simpulan<br>B. Saran   |
| <b>Daftar Pustaka</b> |   |
| <b>Lampiran</b>       |   |

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Kesejahteraan Pareto**

Menurut Pareto suatu kebijakan dinyatakan baik apabila menguntungkan satu pihak dan tidak merugikan pihak lainnya. Dalam Teori Pareto dijelaskan mengenai 3 jenis tingkatan kesejahteraan, yakni :

- 1) Pareto Optimal, dalam tingkatan pareto optimal, terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti akan mempengaruhi kesejahteraan atau kelompok lain
- 2) Pareto Non Optimal, dalam kondisi pareto non optimal terjadinya kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan orang lain
- 3) Pareto Superior, dalam Pareto Superior terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan tertinggi dari orang lain. Menurut teori pareto tersebut, ketika kondisi kesejahteraan masyarakat sudah mencapai kondisi pareto optimal, maka tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan.<sup>48</sup>

##### **2. Teori Kebijakan Van Meter dan Van Horn**

<sup>49</sup>Van Meter dan Horn mengemukakan 6 dasar implementasi terbentuknya kebijakan, dijelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

---

<sup>48</sup> Ratna Ekasari, "*Pemberdayaan Ekonomi*", (AE Publishing, 2020), h 30-31

<sup>49</sup> Dr. A. Adang Supriyadi, "*Airmanship*", (Gramedia Pustaka Utama, Agustus 2019), h.173

- 1) Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- 2) Sumber Daya
- 3) Karakteristik Organisasi Pelaksana
- 4) Sikap Para Pelaksana
- 5) Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan
- 6) Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Berikut jabaran dari ke 6 dasar implementasi terbentuknya kebijakan tersebut :

- 1) Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Van Meter dan Van Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.
- 2) Sumber Daya, Menurut Van Meter dan Horn Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.
- 3) Karakteristik Organisasi Pelaksana, Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini

berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

- 4) Sikap Para Pelaksana, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan, semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.
- 5) Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan, sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.
- 6) Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu,



upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.<sup>50</sup>

### 3. Teori Kemiskinan Sharp *Et Al*

Menurut Sharp *et al.* (2002) kemiskinan bersumber dari hal di bawah ini, yaitu :

- 1) Rendahnya kualitas angkatan kerja. Salah satu penyebab terjadinya kemiskinan adalah karena rendahnya kualitas angkatan kerja. Kualitas angkatan kerja ini dapat dilihat dari angka buta huruf. Sebagai contoh Amerika Serikat hanya mempunyai angka buta huruf sebesar 1% dibandingkan dengan Ethiopia yang mempunyai angka di atas 50%.
- 2) Akses yang sulit terhadap kepemilikan modal. Kepemilikan modal yang sedikit serta rasio antara modal dan tenaga kerja (*capital-to-labor ratio*) menghasilkan produktivitas yang rendah yang pada akhirnya menjadi faktor penyebab kemiskinan.
- 3) Rendahnya tingkat penguasaan teknologi. Negara-negaradengan penguasaan teknologi yang rendah mempunyai tingkat produktivitas yang rendah pula. Tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan terjadinya pengangguran. Hal ini disebabkan oleh kegagalan dalam mengadatasi teknik produksi yang lebih modern. Ukuran tingkat penguasaan teknologi yang rendah salah satunya dapat dilihat dari penggunaan alat-alat produksi yang masih bersifat tradisional.
- 4) Penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Negara miskin sumber daya yang tersedia tidak dipergunakan secara penuh dan efisien. Pada tingkat rumah tangga penggunaan sumber daya biasanya masih bersifat tradisional yang menyebabkan terjadinya inefisiensi.

---

<sup>50</sup> Agustino L, “*Politik & Kebijakan Publik*” Bandung : AIPI Bandung bekerja sama dengan Puslit KP2W Lemlit Unpad, (2006). h.52

- 5) Pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk berkembang sesuai deret ukur sedangkan produksi bahan pangan berkembang sesuai deret hitung. Hal ini mengakibatkan kelebihan penduduk dan kekurangan bahan pangan. Kekurangan bahan pangan merupakan salah satu indikasi terjadinya kemiskinan.<sup>51</sup>

## B. Dana Desa

### 1. Definisi Dana Desa

Menurut kementerian keuangan melalui buku saku dana desa sebagai berikut, Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>52</sup>

Menurut Simanjuntak dan Hidayanto menyebutkan bahwa perumusan alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan stabil. Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah daerah. Fleksibel artinya besar dana alokasi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat sedangkan stabil artinya bahwa adanya kepastian bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan alokasi dana.<sup>53</sup>

Menurut Emilianus Jaa, Dana Desa dikatakan baik apabila alokasi dana terdapat transparansi serta akuntabilitas, juga turut serta partisipasi masyarakat, akuntabilitas adalah bentuk

---

<sup>51</sup> Wahyu Hidayat, "*Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan*", (UMM Press, 2017), h 32-33

<sup>52</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa>, Kamis 19 Maret 2020, 17.13 WIB, h 7

<sup>53</sup> Simanjuntak, Robert A. dan Hidayanto, Joko. 2002. Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Buku Kompas: Jakarta, h.102

tanggung jawab seperti laporan, administrasi, dan pembukuan.

<sup>54</sup>

Salma Yusuf, M Chairul Basrun Umanailo, Nirwana AR Mengatakan, kerjasama aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja desa. Dalam hal ini kemampuan aparatur untuk bekerja sama dengan orang lain guna menyelesaikan tugas yang ditentukan sehingga hasil pekerjaannya akan semakin baik. Tujuan memperbaiki perangkat desa adalah agar transparansi sekaligus efisiensi dana desa dapat digunakan sebagaimana yang di prioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>55</sup>

Ada beberapa kendala yang menjadi penyebab kurang maksimalnya alokasi Dana Desa yang di salurkan, berikut pendapat dari para ahli:

- Menurut Muhammad Zainul Abidin dalam penelitian nya, kendala dalam pelaksanaan keuangan desa disebabkan, antara lain, kurangnya keberadaan dan kapasitas perangkat desa serta kemandirian keuangan. Apabila kendala tersebut dapat diatasi, maka pelaksanaan keuangan desa semakin memperkuat terwujudnya tujuan kebijakan dana desa.<sup>56</sup>
- Sedangkan menurut Intan Mala Sari dan M Faisal Abdullah , bahwa penyebab dari kurang efektif nya Dana Desa dikarenakan penggunaan Dana Desa hanya terfokus pada pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan,

---

<sup>54</sup> Emilianus Jaa, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa”, Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, Volume 7, No 1, April 2019, h 8-9

<sup>55</sup> Salma Yusuf, M Chairul Basrun Umanailo, Nirwana AR, “Relasi Kepala Desa Dan Badan Perwakilan Desadalam Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Namlea”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol 4, No 2 (2020), h.139

<sup>56</sup> Muhammad Zainul Abidin, “Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa”, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 2015. Vol. 6 No. 1, h 73-74

sementara penggunaan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat masih terbilang kecil.<sup>57</sup>

## 2. Sumber Dana Desa

Dasar hukum mengenai Dana Desa sendiri diatur dalam beberapa peraturan seperti, Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa dan, PMK Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.<sup>58</sup>

Dasar Peraturan Desa dan Dana Desa antara lain:

- 1) UU 6/2014 tentang Desa
- 2) 2. PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014
- 3) 3. PP 8/2016 ttg Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.<sup>59</sup>

UU 6/2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.<sup>60</sup> Belanja negara sendiri adalah keharusan pemerintah pusat yang dinyatakan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.<sup>61</sup> Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer kepada daerah. Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya adalah belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lain-lain dan transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer ke daerah yaitu dana

---

<sup>57</sup> Intan Mala Sari, M Faisal Abdullah, “Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol 15 No 1 (2017), h.47

<sup>58</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Buku Saku Dana Desa”, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Tahun 2018., h 4

<sup>59</sup> Ibid, h 9

<sup>60</sup> Ibid, h 7

<sup>61</sup> Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

otonomi khusus, dana penyesuaian dan dana perimbangan.<sup>62</sup>

Pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang telah dipertimbangkan dan sirumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a) Alokasi dasar
- b) Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota (Alokasi Formula).<sup>63</sup>

### 3. Tujuan Dana Desa

Berikut tujuan dana desa menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa:

- 1) Meningkatkan pelayanan publik di desa
- 2) Mengentaskan kemiskinan
- 3) Memajukan perekonomian desa
- 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
- 5) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.<sup>64</sup>

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa, dialokasikan untuk mencapai tujuan

---

<sup>62</sup> Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: ANDI, 2002), h. 36

<sup>63</sup> Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. h 3

<sup>64</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa>, Loc.Cit

pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:

- a) Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes
- b) Pengelolaan dan pembinaan Posyandu
- c) Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.

2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :

- a) Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
- b) Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
- c) Pembangunan dan pemeliharaan embung desa
- d) Pembangunan energi baru dan terbarukan
- e) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
- f) Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa
- g) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier
- h) Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan dan

- i) Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.<sup>65</sup>

#### 4. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Mekanisme penyaluran Dana Desa merupakan alur terbitnya Dana Desa itu sendiri hingga dana tersebut sampai ke pedesaan untuk kemudian di maksimalkan melalui desa-desa tersebut dan diharapkan dana-dana tersebut tepat sasaran dalam penyaluran nya, Penyaluran Dana Desa sendiri terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa, seperti yang terlihat dalam gambar berikut :<sup>66</sup>



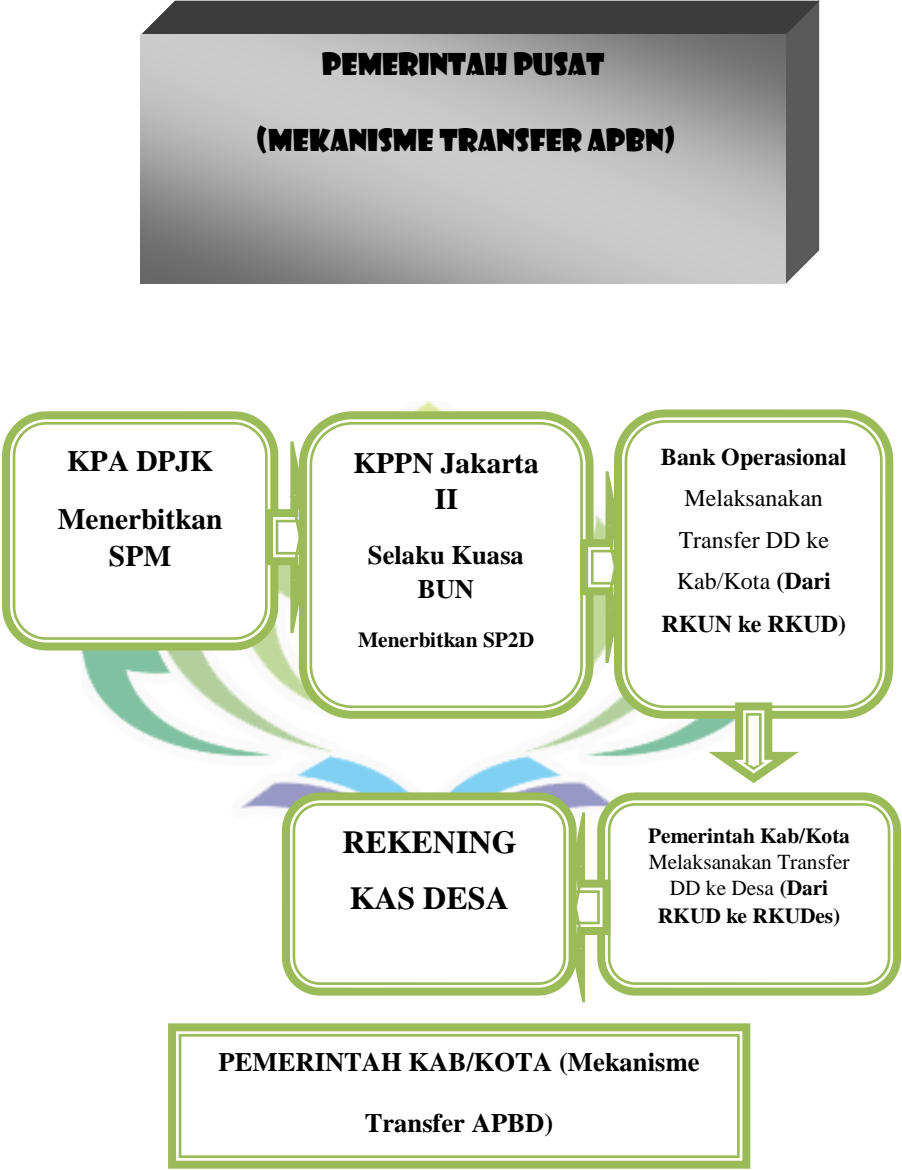

---

<sup>65</sup> Pasal 8 dan 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

<sup>66</sup> Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, Deputi Bidang Pencegahan KPK, 2015



Gambar 2.1  
Mekanisme Transfer APBN Dana Desa



<sup>67</sup>Berikut tata cara pengalokasian dana desa dari APBN sampai Rekening Kas Desa :

#### 1. Penyaluran dari RKUN ke RKUD

- a) Tahap I sebesar 60% paling cepat Maret dan paling lambat bulan Juli, dengan persyaratan:
  - 1) Perda APBD
  - 2) Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa
  - 3) Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan realisasi penyerapan DD TA sebelumnya.
- b) Tahap II sebesar 40%, paling cepat bulan Agustus dengan persyaratan:
  - 1) Laporan DD Tahap I telah disalurkan ke RKD paling kurang 90%
  - 2) Laporan DD Tahap I telah diserap oleh desa rata-rata paling kurang 75%
  - 3) rata-rata capaian output paling kurang 50%.

#### 2. Penyaluran dari RKUD ke RKD

- a) tahap I disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD, dengan persyaratan:
  - 1) Perdes APBDesa; dan
  - 2) Laporan realisasi penyerapan DD tahun anggaran sebelumnya.
- b) Tahap II: disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD, dengan persyaratan

- 1) Laporan penyerapan DD Tahap I menunjukkan rata-rata paling kurang 75%; dan
- 2) capaian output rata-rata paling kurang 50%.<sup>68</sup>

## 5. Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk Tabligh. Tabligh atau menyampaikan segala sesuatu tanpa ada yang disembunyikan mengandung makna kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam niat dan kemauan, kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam melaksanakan rencana, kejujuran dalam tindakan, kejujuran dalam merealisasikan dalam semua ketentuan agama. Dalam pengelolaan anggaran kejujuran ini tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi anggaran. Maka menjalankan transparansi anggaran adalah wajib. Ini berarti dalam pandangan hukum islam, menghindari transparansi anggaran adalah kemaksiatan yang dapat menghapus semua pahala ibadah kepada tuhan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan sesuai dengan firman allah dalam surah an-nahl ayat 101 sebagai berikut:<sup>69</sup>

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ - ١٠١

Terjemahan : *“Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.”*

---

<sup>68</sup> Ibid

<sup>69</sup> Nurhayati dan Muh Saleh Ridwan, *Op.Cit*, h 76

Tafsir : Ayat ini meenguraikan bahwa *dan apabila* kami *mengganti suatu ayat alqur'an di tempat ayat yang lain padahal Allah* yang pengetahuannya maha luas *lebih mengetahui* dari siapapun apa yang diturunkannya, antarlain menyangkut kapan dan apa yang digantidan menggantikan serta apa yang merupakan kemaslahatan masyarakat. apabila terjadi yang demikian, sebagian mereka yang tidak mengetahui itu berkata: “*sesungguhnya engkau*, wahai nabi Muhammad, berbohong dalam pengakuanmu bahwa penggantian itu bersumber dari allah, bahkan engkau banyak sekali berbohong sehingga engkau sebenarnya adalah pengada-ada, yakni pembohong.”<sup>70</sup>

Akuntabilitas dan transparansi merupakan bentuk pengelolaan Dana Desa di Provinsi Lampung, dimana Akuntabilitas dalam perspektif hukum islam yang menggambarkan suatu pertanggung jawaban yang mutlak. Sebagai salah satu contoh sifat nabi yakni amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang. Mengenai bentuk akuntabilitas tersebut dapat kita lihat dalam firman allah surat al-ahzab ayat 72-73.<sup>71</sup>

Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal ini yang menjadi hak pemerintah desa adalah sebagai pemimpin dimana warga masyarakat memiliki kewajiban menaati pemimpin, agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang kewenangan di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa.

## C. Kemiskinan

### 1. Definisi Kemiskinan

Menurut M Nur Rianto Al Arif, Secara umum kemiskinan setidaknya dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu pertama, kemiskinan absolut, dimana dengan pendekatan ini

---

<sup>70</sup> Quraish Shihab, *Op.Cit*, h.730

<sup>71</sup> Nurhayati, Muh Saleh Ridwan, *Op.Cit* h.79

diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata lain, kemiskinan relatif mempunyai keterkaitan yang erat dengan permasalahan distribusi pendapatan.<sup>72</sup>

Pungky Sumady dalam penelitian nya, mengemukakan pandangannya tentang kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan. Menurut nya, kemiskinan merupakan klaster dari berbagai kondisi kurang menguntungkan yang saling berkaitan satu sama lain, dan menyebabkan seseorang terperangkap serta sulit keluar dari kondisi kemiskinan. Kondisi kurang menguntungkan tersebut meliputi kelemahan fisik, kerentanan terhadap guncangan, keterisolasian, ketidakberdayaan, dan kemiskinan itu sendiri.<sup>73</sup>

Menurut Asta Aneta melalui penelitian nya, Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, meliputi faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi merupakan faktor penting yang perlu diutamakan, dan pada realitasnya dapat mendukung terhadap pelaksanaan seluruh tahapan program dan kegiatan kemiskinan dalam kebijakan pemerintah. Selain faktor-faktor diatas faktor partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> MnurRiantoAlArif, "Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan", Jurnal Ekbiis Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Vol. 5, No. 1, Desember 2010, h.5

<sup>73</sup> PungkySumadi, *Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi*, (Jakarta: Kedeputan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, 2018) h.8

<sup>74</sup> Asna Aneta, "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kota Gorontalo" , Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010, h 62-63

Di Indonesia sendiri ada 3 program penanggulangan kemiskinan yang tercantum didalam Perpres No 13 Tahun 2009, sebagai berikut<sup>75</sup> :

1. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Masalah kemiskinan bukanlah masalah baru. Masalah kemiskinan ada sejak jaman dahulu, berbagai negara dan agama telah mencoba berbagai cara untuk mengakhiri permasalahan kemiskinan. Kemiskinan itu merupakan sebuah masalah besar yang implikasinya bisa menyebabkan seseorang jauh dari tuhan, bahkan Sahabat Ali bin Abi Tholib pernah mempertegas seandainya kemiskinan itu berwujud manusia maka aku akan membunuhnya.<sup>76</sup>

## 2. Penyebab Kemiskinan

Menurut teori development of under development atau teori ketergantungan-dominasi (*Dominance-Dependency*) bahwa sebab-sebab kemiskinan dan keterbelakangan bukanlah

<sup>75</sup> Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009, Pasal 4

<sup>76</sup> Fahmi Huwaidi, *All-Qur'an Wa Al-Sulta* ( Kairo: Dar al-Syurq. 1991). Hlm. 172.

sekedar faktor-faktor yang tedapat pada masyarakat yang bersangkutan seperti kurangnya modal, pendidikan yang rendah, kepadatan penduduk, kurangnya gizi dan sebagainya. Lebih dari itu faktor-faktor tersebut hanyalah merupakan atribut kemiskinan saja, tetapi kemiskinan itu sendiri berakar dari sejarah exploitasi, terutama yang dilakuakan oleh kekuatan kapitalis asing atau internasional yang melakukan penetrasi, dominsai dan pengerukan keuntungan dari daera pinggiran ke pusat-pusat metropolis.<sup>77</sup>

Kuncoro berpendapat penyebab kemiskinan bisa dianalisis melalui dua aspek, yaitu aspek sosial dan ekonomi. Karena kedua aspek tersebut saling berkaitan. Adapun penyebabnya yaitu:<sup>78</sup>

- 1) Rendahnya akses terhadap lapangan pekerjaan. Tingkat kesempatan kerja adalah rasio antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja.
- 2) Lemahnya akses masyarakat terhadap faktor produksi, lemahnya akses tersebut jika dijabarkan yaitu:
  - a) Rendahnya akses modal usaha.
  - b) Lemahnya masyarakat dalam mengakses pasar.
  - c) Sedikitnya kepemilikan aset.

### 3. Indikator Kemiskinan SDGs

Tepat pada tanggal 2 agustus 2015, bertempat di markas PBB. New York, sebanyak 193 negara, secara mufakat menyepakati dokumen pembangunan global baru yang berjudul *Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*. Dan pada bulan berikutnya, pada tanggal 25-27 September 2015, ditempat yang sama perwakilan 193 negara

---

<sup>77</sup> M. Dawam Raharjo, *Esensi-Esensi Ekonomi Politik* (Jakarta: LP3ES, 1985). hlm. 8

<sup>78</sup> Mudrajad Kuncoro, "*Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*", *Op.Cit*, h 132.

anggota PBB menindaklanjutinya dengan melakukan pertemuan yang dikenal dengan *Sustainable Development Summit* dan mengesahkan sebuah dokumen yang disebut *Sustainable Development Goals (SDGs)*.<sup>79</sup>

Dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2017, sebagai turunan dari SDGs ditetapkan 17 indikator yang menjadi tujuan kedepan dalam mengatasi Kemiskinan dan 1 indikator tambahan berdasarkan SDGs desa tahun 2020 yang dibuat oleh kementerian keuangan, yaitu :

1. Tanpa Kemiskinan, tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di Indonesia;
2. Tanpa Kelaparan, tidak ada kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera, mendorong dan mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera untuk seluruh masyarakat di segala umur;
4. Pendidikan berkualitas, menjamin pemerataan pendidikan berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang;
5. Kesetaraan Gender, mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak, menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang;
7. Energi Bersih dan Terjangkau, menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan, dan modern untuk semua orang;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, mendukung memfasilitasi perkembangan ekonomi

---

<sup>79</sup> A Halim Iskandar, “SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan”, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 16 November 2020), h 7-8



yang berkelanjutan, lapangan pekerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang;

9. Industri Inovasi dan Infrastruktur, membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong inovasi dan peningkatan industri yang berkelanjutan;
10. Berkurangnya Kesenjangan, mengurangi ketidaksetaraan baik antara orang maupun antara daerah dan daerah di Indonesia;
11. Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan, Membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab, menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi yang ramah lingkungan;
13. Penanganan dan Perubahan Iklim, bertindak cepat dan menangani perubahan iklim dan dampaknya;
14. Ekosistem Laut, melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut;
15. Ekosistem Daratan, melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, serta mengelolanya secara berkelanjutan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, meningkatkan perdamaian masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan serta menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, merevitalisasi dan menghidupkan kembali kemitraan global, serta kemitraan antar daerah untuk pembangunan berkelanjutan.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> A Halim Iskandar, Ibid, h 13-15

## 18. Kelembagaan yang Dinamis, dan Budaya Adaptif.<sup>81</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sofianto tahun 2019, dikatakan bahwa SDGs yang hanya dimaknai sebagai kegiatan tanpa ada dukungan aksi serta masih sedikitnya program yang diintegrasikan maka akan sulit untuk di optimalkan. Untuk itu disarankan pelaksanaan program SDGs harus dilakukan bersama oleh semua pihak terkait semua akses.<sup>82</sup>

Menurut Nanda Bhayu Pratama, Eko Priyo Purnomo, dan Agustiyara dalam penelitiannya, SDGs merupakan sebuah konsep yang lebih kompleks dari MDGs dengan cenderung lebih teknokratis dan bersifat birokratis. Dalam penyusunan butir-butir SDGs terlihat lebih inklusif dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil guna menyelesaikan permasalahan yang ada.<sup>83</sup>

Dalam sosialisasi mengenai SDGs Desa yang dilakukan oleh DPJK kementerian keuangan, terdapat prioritas dalam menggunakan Dana Desa untuk pencapaian SDGs Desa, yaitu<sup>84</sup> :

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa
  - 1) pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes/ BUMDesma (SDGs 8)
  - 2) penyediaan listrik Desa (SDGs 7)
  - 3) pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/ BUMDesma (SDGs 12)

---

<sup>81</sup> <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/12/sosialisasi-permendesa-13-2020>, Diakses Tanggal, 19 Agustus 2021, 20.31 WIB

<sup>82</sup> A Sofianto, “*Integrasi Target Dan Indikator Sustainable Development Goals (Sdgs) Ke Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Jawa Tengah*”, Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah (2019), Vol 17 (1), h 40

<sup>83</sup> Agustiyara, Eko Priyo Purnomo, Nanda Bhayu Pratama, “*Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora ( Vol. 6 No. 2 Agustus 2020), h 65

<sup>84</sup> <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/12/sosialisasi-permendesa-13-2020>, Op.Cit, h 16

## 2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa

- 1) Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (SDGs 17)
- 2) Pengembangan Desa wisata (SDGs 8)
- 3) penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa (SDGs 2)
- 4) Desa inklusif (SDGs 5, 16, 18)

## 3. Adaptasi kebiasaan baru: Desa Aman Covid-19 (SDGs Desa 1 dan 3)

## 4. Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau kelompok atas ketidakmampuan dalam memenuhi ekonomi, sosial dan politik dikehidupan untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan menurut pandangan Islam merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*Falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*Al-hayah Al-Tayyibah*).<sup>85</sup>

Berikut adalah ayat Al-Qur'an mengenai hak warga miskin :

<sup>86</sup>Q.S AR-Rum : 38

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ  
يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahan :

*Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.*

<sup>85</sup> Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", Jurnal Equilibrium, Vol. 3 No.2, (Desember 2015), h. 387

<sup>86</sup> Kitab Al-Qur'an , Ar-Rum : 38

Tafsir :

Berdasarkan ayat tersebut maka ditafsirkan, Usai menjelaskan bahwa lapang-sempitnya rezeki merupakan ketentuan Allah dan sarana untuk menguji keimanan hamba-Nya, kemudian pada ayat ini Allah meminta orang mukmin tidak hanya berinfak dan bersedekah, melainkan juga melakukan kebaikan apa pun bentuknya kepada siapa saja, khususnya kaum kerabat. *Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat* dengan menjaga hubungan silaturahmi, berbuat kebajikan, dan berkorban untuknya, *juga kepada orang miskin* dengan meringankan beban hidupnya *dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah* melalui usaha-usaha baiknya. *Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.* Melalui pemberian dan pengorbanan, dalam lingkup terbatas, kerabat akan tercukupi kebutuhannya, dan dalam lingkup yang lebih luas, perbuatan itu akan melahirkan sikap tolong-menolong di antara sesama muslim.<sup>87</sup>

Islam sangat memandang penting permasalahan kemiskinan ini karena kefakiran akan menyebabkan lemahnya iman dan membuat seseorang terpuruk. Rasulullah SAW sangat memperhatikan permasalahan ini, sehingga beliau dalam pengelolaan keuangan negara menggunakan prinsip langsung menyalurkan semua dana yang dimiliki kepada para mustahik sampai habis tanpa menyisakannya. Kebijakan anti kemiskinan pun turut dianut oleh para Khulafaur Rasyidin yang merupakan penerus perjuangan Rasulullah SAW untuk mengentaskan kemiskinan itu sendiri, sehingga pengelolaan dan pendayagunaan zakat pada masa tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat, karena dari segala struktur baik dari strategi maupun cara kepemimpinan cukup baik sehingga

---

<sup>87</sup> Quraish Shihab, *Op.Cit*, Hal 20.

permasalahan kemiskinan dapat di atasi. Kesejahteraan umat menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan juga dalam kebijaksanaan pembangunan negara.<sup>88</sup>

#### 5. Hubungan Dana Desa dengan Kemiskinan

Dalam Buku Saku Dana Desa yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan diperjelas Tujuan dari Dana Desa itu sendiri yang tercantum dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (2) yang berbunyi, Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan<sup>89</sup> :

- a. Jumlah penduduk
- b. Angka kemiskinan
- c. Luas wilayah, dan
- d. Tingkat kesulitan geografis

Prof Chanif Nurcholis menyampaikan untuk memaksimalkan pengelolaan Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka Dana Desa perlu menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, dengan cara meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Sumar'in, "Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Mikro Pespektif Ekonomi Islam, Yogyakarta", Graha Ilmu, 2013. h 86

<sup>89</sup> Kementrian Keuangan, "Buku Saku Dana Desa", Op.Cit, h.7

<sup>90</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta 2011 : Penerbit Erlangga. h 54

## D. Ekonomi Islam

### 1. Definisi Ekonomi Islam

Ekonomi Syariah menurut beberapa ahli:<sup>91</sup>

- a. Menurut M.A. Manan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.
- b. Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, pengertian Ekonomi Syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-quran dan hadits yang mengatur perekonomian umat manusia.
- c. Menurut Dr. Mardani, pengertian ekonomi syariah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh per orang atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber dari nilai nilai Islam (Al-Quran dan Hadits) yang dijadikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia demi menjaga kelangsungan hidupnya, Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al - Baqarah Ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan :

*Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta*

---

<sup>91</sup> Aan Anshori, "Digitalisasi Ekonomi Syariah". Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam, Vol.7 No.1, 2016, Hal 4.

*itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*<sup>92</sup>

Tafsir :

*Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil seperti dengan cara korupsi, menipu, ataupun merampok, dan jangan pula kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim untuk bisa melegalkan perbuatan jahat kamu dengan maksud agar kamu dapat memakan, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa karena melanggar ketentuan Allah, padahal kamu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan Allah.*<sup>93</sup>

## 2. Karakteristik Ekonomi Islam

Tidak banyak yang dikemukakan dalam alquran dan banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja, karena dasar-dasar yang sangat tepat, alquran dan sunah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berperilaku sebagai konsumen produsen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit system ekonomi. Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain:

- 1) Kesatuan (*Unity*)
- 2) Keseimbangan (*Equilibrium*)
- 3) Kebebasan (*Free Will*)
- 4) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan,

---

<sup>92</sup> Kitab Al-Qur'an, Al-Baqarah 188

<sup>93</sup> Quraish Shihab, *Op.Cit*, Hal 23

industri, pertanian, keuangan jasa, dan sebagainya, yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama.<sup>94</sup>

### 3. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan dari ekonomi syariah adalah untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi syariah adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai islam guna mencapai falah. Ekonomi islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi islam.

## E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.<sup>95</sup>

Untuk menjawab hipotesis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Uji Koefisien Regresi (*R-Square*) dan variabel yang diujikan adalah variabel (X) Dana Desa dan (Y) Kemiskinan. Berikut adalah hipotesis yang telah ditentukan:

Ho : Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan Provinsi Lampung.

---

<sup>94</sup> Didin Hafidhuiddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta : Gema Insani, Jakarta, 2003), h. 29.

<sup>95</sup> Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan pendekatan kualitatif, kuantitatif dan R & D*, Cetakan ke- 23 (Bandung : Alfabeta, 2016), h.8



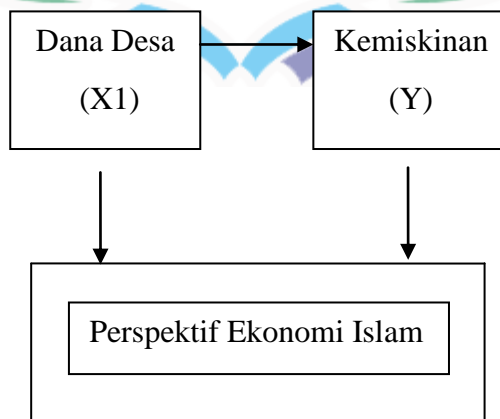
Ha : Dana Desa berpengaruh terhadap Kemiskinan Provinsi Lampung.

## F. Kerangka Berfikir

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikan sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja.

Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah Pengeluaran Pemerintah dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu penyerapan tenaga kerja. Perubahan tingkat realisasi pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi tingkat kemiskinan, semakin tinggi realisasi yang di keluarkan maka tingkat kemiskinan akan semakin sedikit seiring dengan realisasi pengeluaran pemerintah yang di keluarkan untuk membantu masyarakat terutama masyarakat miskin.

Dari uraian diatas, maka kerangka pemikiran dituangkan dalam gambar berikut ini. Dimana variabel (x1) yaitu Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap variabel (y) yaitu kemiskinan dan ditinjau melalui perspektif Ekonomi Islam.



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Berfikir**

## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Anshori, *"Digitalisasi Ekonomi Syariah"*. Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam, Vol.7 No.1, 2016.
- A Lavitan dalam Andre Bayo, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1981).
- A Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta, Media Pustaka.2014).
- Amirus Sodiq, *"Konsep Kesejahteraan dalam Islam"*, Jurnal Equilibrium, Vol. 3 No.2, (Desember 2015).
- Andi Susanto, *"Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes.P) Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019"*
- Andri Kurniawan, *"Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes.P) Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019"*
- Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: FOKUSMEDIA, 2015.
- Christina Usmeliadanti, *"Analisis Pengaruh Tingkat kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009"*. (Disertasi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2011).
- Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, *"Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa"*, Jurnal Adiministrasi Publik (2013), Vol 1 No 6
- Dianti Lalira, Amran T. Nakoko, Ita Pingkan F. Rorong, *"Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud"*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.18 No.04, 2018.

Didin Hafidhuiddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta : Gema Insani, Jakarta, 2003).

Dr.Rozalinda, M.Ag, *Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017)

Dr.Supramono,M.Si, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018)

Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007).

EkaSusiatun, “*Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2007-2016*”, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018)

Fahmi Huwaidi, *All-Qur'an Wa Al-Sulta* ( Kairo: Dar al-Syurq. 1991).

Fahmi Irhamsyah, “*Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional*”, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Vol 7 No 2 (2019)

Firman Setiawan, dan Iswatul Hasanah, “*Kemiskinan Dan Pengentasannya Dalam Pandangan Islam*”, Jurnal DINAR Ekonomi Syariah Vol. 1 (1), 2016

Intan Mala Sari, M Faisal Abdullah, “*Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung*”, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (2017), Vol 15, No 1

Ishartono dan Santoso Tri Raharjo, “*Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*”, Social Work Journal, Vol 6, No 2 (2016)

Kartini Hartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Kencana, 1998).

Keppi Sukesi, “*Gender dan Kemiskinan di Indonesia*”,(UB Press, Juli 2015)

Kitab *Al-Qur'an*, Al Isra 26

Kitab *Al-Qur'an* Q.S Ar-Rum ayat 38

Kitab Al-Qur'an , Ar-Rum : 38

Kitab Al-Qur'an, Al-Baqarah 188

Kitab Al-Qur'an, An Nahl 101

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, "*Buku Saku Dana Desa*",  
Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Tahun 2018.

Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana  
Desa dan Dana Desa, Deputi Bidang Pencegahan KPK, 2015

Laporan Keuangan BUMDes Desa Bumisari Tahun 2019.

Made Krisna Kalpika Sunu, Made Suyana Utama, "*Pengaruh Dana  
Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan  
Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali*", E-Jurnal  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 8.8 (2019):843-  
872, ISSN : 2337-3067.

Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*  
(Yogyakarta: ANDI, 2002).

Majma Al-Lugah Al-Arabiyah, Al-mukjam Al-Wasit, (Kairo: tt, 1972).

M. Dawam Raharjo, *Esensi-Esensi Ekonomi Politik* (Jakarta: LP3ES,  
1985).

MindraMaulana, "*Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan  
Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*",  
(Skripsi Program Strata I UIN Raden Intan Lampung tahun  
2018) .

MnurRiantoAlArif, "*Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya  
Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan*", Jurnal Ekbisi  
Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Vol. 5, No. 1,  
Desember 2010.

MuhammadFirdaus, *Ekonometrika: Suatu Pendekatan Aplikatif*,  
Cetakan ke -1, (Jakarta, Bumi Aksara, 2019).

N. Gregory Mankiw, Euston Quah, Peter Wilson, "*Pengantar  
Ekonomi Mikro*", (Jakarta: Salemba Empat, 2012).

Nilam Indah Susilowati, Dwi Susilowati, Syamsul Hadi, *Pengaruh  
Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, Dan Produk*

*Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur*, Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 1 Jilid 4/Tahun 2017.

Novita Dewi, "Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Riau", Jom Fekon, Vol .4 No. (1 Februari 2017)

Pasal 8 dan 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Pedoman Penulisan Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017/2018.

Priyatno Dwi, "Cara Kilat Belajar Analisis Data", (Yogyakarta; Andi, 2012)

Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan pendekatan kualitatif, kuantitatif dan R & D*, Cetakan ke- 23 (Bandung : Alfabeta, 2016).

Pungky Sumadi, *Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi*, (Jakarta: Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, 2018)

Quraish Shihab, "Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesa, dan keserasian al-Qur'an", 2002, Jakarta: lentera Hati.

Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zilalil Qur'an (Al-Qur'an: Surah Al\_Isra 26), 2003, Jakarta: Gema Insani.

Suharto, Edi, "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosia", (Bandung: PT Rafika Aditama 2009).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72, Ayat 1.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

Yusuf Qardhawi, *Shadaqoh Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Terj. Dadang Sobar ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010 ).

Zulia,Agustiana, "*Konsumsi Energi, Jumlah Penduduk Terhadap Pdrb Provinsi Jawa Tengah Tahun 1985-2012*", Economics Development Analysis Journal, Vol.4 (4) November 2015.

### **Sumber Web :**

Badan Pusat Statistik, Indikator Kemiskinan,(On-line) tersedia di:  
[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). (09-06-2020), Pukul 15.21 WIB

<https://bandarlampung.bpk.go.id/?P=11617>, Kamis 19 Maret 2020,  
14.45 WIB

<https://lampung.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekviewtab5>  
, kamis 17 januari 2019, 19.48 WIB

<https://kbbi.web.id/perngaruh.html>, senin 22 april, 14.29 WIB

<https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>,  
rabu 29 januari 2020, 17.12 WIB

<https://kbbi.web.id/perspektif.html> senin 22 april, 15.04 WIB

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>, Kamis, 19 Maret 2020, 14.19 WIB

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?Ufaq=bagaimana-mekanisme-penyaluran-dana-desa-dari-rkun-ke-rkud>, Kamis 19 Maret 2020, 19.26 WIB

<https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39223/uu-no-13-tahun-2011>,  
Selasa 10 Maret 2020, 19.35 WIB

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42296/perpres-no-13-tahun-2009>, Selasa 10 Maret 2020, 19.47 WIB

<https://www2.kemenag.go.id/berita/78294/pengembangan-ekonomi-syariah-di-lampung>

<https://www.pringsewukab.go.id/detailpost/ojk-lampung-jajaki-pengembangan-ekonomi-syariah-di-pringsewu>

<https://lampung.bps.go.id/pressrelease/2017/01/03/487/angka-kemiskinan-lampung-september-2016-mencapai-13-86-persen.html>

<https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>,  
Diakses tanggal, 19 Agustus 2021, 28.25 WIB

<https://www.ksp.go.id/di-sidang-umum-pbb-indonesia-pastikan-agenda-sdgs-berjalan.html>, Diakses tanggal, 12 Agustus 2021  
, 13.59 WIB

<http://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>, Diakses Tanggal, 12 Agustus  
2021, 14.17 WIB

<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1603>, Diakses  
Tanggal 04 Oktober 2021

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9951e58b78a8133f1643a0fd69a538c7.html>

